

**EKSISTENSI KURIKULUM PESANTREN
DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Ahmad Saifuddin
(Dosen STAI Darussalam Krempyang Nganjuk)**

Abstract

As a native Islamic educational institution in Indonesia, Pesantren has showed its success in preserving its existentialism. From the colonial period to the reformation period, Pesantren is getting more recognition in Indonesian legal system, particularly in the act of national education. As an Islamic educational institution, Pesantren has several element in its body, such as the kyai (the orthodox teacher), santri (the disciples), pondok, (the dorms), mosque, teaching methods, and kitab kuning (the yellow scriptures). The Pesantren has the salafiyah and khalafiyah as the variants. However, both of them implement the same teaching methods such as sorogan, bandongan, and wetonan. The Pesantren curriculum is a way of achieving educational goals and a direction of education with nation philosophies. The educational policy area in the Pesantren education exists both in national and local level. Issues and policy of education consist of actual problems in educational policy domain. The system and procedure of educational policy making involves several functions, such as allocation, inquiry, and communication. Methodological discourse in educational policy cannot be separated from the discourse of education itself. Pesantren –despite as a native educational system- cannot be separated from the dynamics of national education policy.

Keywords: *Pesantren, Combined Curriculum, and Policy of Education*

Abstrak:

Sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, pondok pesantren sudah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga eksistensi diri. Sejak zaman sebelum merdeka sampai orde reformasi, pesantren semakin diakui keberadaannya dalam perundang-undangan Indonesia, terutama terkait pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki unsur kyai, santri, pondok, masjid, metode pembelajaran dan kitab kuning. Variasi pondok pesantren menjadi *salafiyah* dan *khalafiyah*. Namun keduanya tetap memakai ketiga metode pembelajaran, yaitu *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*. Kurikulum pesantren merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Lingkungan kebijakan pendidikan adalah ruang lingkup yang berada pada lingkungan dari sistem pendidikan tersebut, baik terpusat maupun bersifat lokal. Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari isu-isu yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan di bidang pendidikan. Sistem dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan meliputi fungsi alokasi, fungsi inquiri dan fungsi komunikasi. Kajian metodologi dalam kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai substansi pendidikan itu sendiri. Pesantren –meskipun merupakan model pendidikan asli pribumi- namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional.

Kata Kunci: *Pesantren, Kurikulum Kombinasi, dan Kebijakan Pendidikan*

A. Pendahuluan

Kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Makna kurikulum juga dapat merujuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Di samping itu, kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat yang mencakup lingkup tertentu, baik suatu sekolah, kabupaten, propinsi ataupun seluruh negara.¹

¹ MM. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), 36.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama (pondokan) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat karismatis serta independen dalam segala hal, pondok pesantren tumbuh subur di tanah Indonesia jauh hari sebelum Indonesia merdeka.² Pesantren dapat dikatakan sebagai lembaga non-formal Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.³

Menurut Manfred, pesantren berasal dari masa sebelum Islam dan memiliki kesamaan dalam ajaran agama Budha dalam bentuk asrama. Sedangkan menurut Robson, kata santri berasal dari bahasa Tamil di India, yaitu *sattiri* yang berarti guru mengaji atau orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan pada umumnya.⁴

Pada masa Orde Baru, dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), kurikulum diartikan sebagai sebuah perangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.⁵ Belajar itu sendiri merupakan sebuah proses berpikir anak, baik secara intuitif maupun analitik, sehingga merasa lebih mudah membahas atau melakukan pemikiran analitik karena lebih bersifat kongkret daripada berpikir intuitif yang lebih abstrak.⁶

Di samping itu, terdapat pendidikan yang memiliki fungsi hakiki sebagai wadah dari kurikulum untuk mempersiapkan sumber

² Djamaludin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 99.

³ Manfred Oepon Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988), 110.

⁴ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 93.

⁵ *Ibid*, 36.

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Penegembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 161.

daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam melaksanakan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan. Hubungan antara kurikulum dan pendidikan tidak bisa terlepas dari bidang-bidang kehidupan di luar pendidikan. Hal ini perlu dibahas agar terjadi sinergi antara sistem internal pendidikan dan faktor eksternal tersebut. Tantangan eksternal dari sistem pendidikan seharusnya merupakan sumber inspirasi paling utama dalam melakukan perubahan dan pembaruan sistem pendidikan itu sendiri secara internal.

Dengan melakukan kajian terhadap keadaan dan permasalahan mengenai bidang-bidang kehidupan lain di luar pendidikan, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem pendidikan akan muncul. Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut upaya meningkatkan pendidikan secara internal, tetapi juga upaya dalam meningkatkan kesesuaian kurikulum pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.

Tuntutan paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan adalah meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik-teknik penelitian dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan secara lintas sektoral. Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan alternatif kebijakan untuk membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu dan relevan dengan tuntutan masyarakat di berbagai bidang sesuai kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah konsumen pendidikan.

Agar animo masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi, maka perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu. Pada aspek ekonomi, pendidikan merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebuah negara, jika ingin maju di bidang pembangunan ekonomi.

Tidak ada negara yang maju perekonomiannya hanya berdasarkan kekayaan alam, tetapi harus berinvestasi pada manusia.

Aspek berikutnya adalah motif merubah status dan kredibilitas sosial. Ketika seseorang berniat menuntut ilmu, pasti sudah memiliki cita-cita yang ingin diraih, baik tulus menuntut ilmu, berbagi pengalaman, mendapat gelar keserjanaan untuk mendapatkan pekerjaan layak ataupun demi investasi masa depan yang cemerlang. Kondisi ini ditambah dengan keberadaan *judgement* masyarakat yang berbeda, yaitu adanya dua macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu: 1. Dunia kerja memakai standar gelar akademik untuk menjaring tenaga kerja dan karyawan, semakin tinggi gelar pendidikan yang diperoleh, sudah pasti diterima bekerja; 2. Dunia dan pasar kerja menganut paradigma mekanis serta keuntungan ekonomis sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan hal itu, nampak jelas bahwa kebijakan sangat penting bagi kehidupan siswa, para guru dan pengelola pendidikan, karena berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran demi peningkatan efektifitas sekolah dan prestasi pelajaran. Tidak terkecuali peran administrator dan anggota komite sekolah yang sangat menentukan kebijakan yang jelas sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan pasar pendidikan.

B. Manajemen Pemasaran Pendidikan

Pemasaran merupakan proses transaksioanal untuk meningkatkan harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen menjadi tertarik agar memiliki produk yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati. Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi dan pembiasaan manusia agar menjadi manusia yang artinya memanusiasi manusia. Sekolah merupakan salah satu kelembagaan satuan pendidikan.⁷ Meski mayoritas orang sering mengidentikkan sekolah dengan pendidikan, pendidikan merupakan wahana perubahan peradaban manusia.

⁷ *Ibid*, 338.

Ketika membicarakan sistem pendidikan, tidak cukup hanya membahas sistem persekolahan, sehingga untuk membicarakan pemasaran pendidikan sebenarnya tidak cukup hanya dengan membahas terbatas pada pemasaran persekolahan. Hal ini dikarenakan paradigma pendidikan begitu universal dan tidak hanya dipandang secara terbatas pada sistem persekolahan. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan tidak kasat mata. Untuk mengenal lebih dalam mengenai pemasaran pendidikan, maka harus mengenal lebih dulu pengertian dan karakteristik pendidikan yang itu sendiri.

Pemasaran merupakan kunci penting dalam setiap perusahaan, baik perusahaan yang menjual jasa atau barang. Meski demikian, perlu disadari bahwa inti dari pemasaran adalah memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan (*the best services*). Sedangkan konsep pemasaran sendiri dalam dunia pendidikan yang *notabene* menjual jasa adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menulis bahwa hakikat pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pendidikan sangat penting dan harus menjadi posisi utama sebagai langkah awal yang harus ditempuh, demi kemajuan masa depan anak bangsa.

Pendidikan merupakan wahana pencerahan peradaban suatu bangsa, kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peserta didik pada masa yang akan datang. Program pembangunan di Indonesia mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam tataran riil, dunia pendidikan dihadapkan pada masalah kompleks, baik berkaitan dengan masalah infra maupun supra

struktur, seperti pergantian kurikulum, anggaran dana pendidikan yang tidak teralokasikan secara maksimal, kurangnya profesionalisme tenaga pendidik, tuntutan standarisasi ujian nasional dan beraneka ragam animo masyarakat terhadap pendidikan.

Persoalan klasik tersebut, terus mengundang perdebatan dari tahun ke tahun. Jika dikaji lebih mendalam, animo masyarakat tentang dunia pendidikan cukup menggembirakan. Hal ini dibuktikan oleh ratusan atau bahkan ribuan calon siswa atau mahasiswa menyerbu institusi pendidikan, setiap tahun ajaran baru dimulai. Tradisi tersebut seakan-akan tidak terpengaruh oleh kondisi sosial, budaya, politik, moral maupun jeratan krisis ekonomi yang menghimpit bangsa ini. Fenomena kegandrungan masyarakat terhadap pendidikan tentu saja disambut gembira oleh institusi penyedia pendidikan. Kehadiran sekolah baru, baik negeri maupun swasta, seolah menjadi *trend* masa kini.

Oleh karena itu, agar kurikulum pendidikan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka diperlukan strategi pemasaran, baik melalui model *Liflet* ataupun *Boklet*. Model *Liflet* merupakan salah satu media publikasi singkat dari berbagai media komunikasi berupa selebaran yang berisi keterangan atau informasi tentang organisasi dan jasa atau ide untuk diketahui oleh umum. Model *Boklet* adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bersifat promosi, anjuran atau larangan kepada khalayak massa dan berbentuk cetakan, sehingga akhir dari tujuan tersebut adalah agar masyarakat memahami dan menuruti pesan yang terkandung dalam media komunikasi tersebut.

C. Kurikulum Kombinasi Pesantren

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam

segala hal.⁸ Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga non-formal Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.⁹

Tentang implementasi Kurikulum 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015, maka MI, MTs dan MA di luar sasaran pendampingan, harus kembali menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, dengan mengacu pada KMA Nomor 165 Tahun 2014.¹⁰ Keputusan ini diambil sejak munculnya surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang penghentian pelaksanaan kurikulum 2013.¹¹

Kurikulum KTSP 2006 itu sendiri berlaku berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi¹² dan Permenag Nomor 2 Tahun 2008 Tentang SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab.¹³ Sedangkan implementasi Kurikulum 2013 di Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara KTSP 2006 untuk mapel umum dan kurikulum 2013 untuk mapel PAI dan Bahasa Arab, maka yang dibutuhkan

⁸ Djamaludin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 99.

⁹ Manfred Oepon Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, 110.

¹⁰<http://www.abdimadrasah.com/2015/01/struktur-kurikulum-2013-kombinasi-kurikulum-2006-pada-madrasah.html>.

¹¹<http://gladysnereweb.blogspot.com/2013/05/kelebihan-dan-kekurangan-kurikulum-2013.html>.

¹² Imam Bawani, *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007), 11.

¹³ *Ibid*, 8.

adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.

Sebagai jantung pendidikan, kurikulum dipandang sebagai hal esensial bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam semesta demi mempertahankan hidup. Pendidikan dalam kehidupan manusia memiliki peran sangat penting. Pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang dan pendidikan diakui sebagai kekuatan yang mampu menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Dengan bantuan pendidikan, seseorang memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, sehingga mampu menciptakan karya gemilang dalam hidup atau mampu mencapai suatu peradaban dan kebudayaan tinggi dengan bantuan pendidikan. Mengingat urgensi pendidikan, Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang penting dan tinggi dalam doktrin Islam.¹⁴

Sebagai respon dari bentuk perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah, maka pondok pesantren harus bersedia menggeser orientasi untuk mampu melakukan kolaborasi kurikulum yang selama ini berjalan di lembaganya. Unsur pondok pesantren sendiri meliputi kyai, masjid, santri, pondok atau asrama dan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning). Kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya.¹⁵ Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi SAW sampai sekarang, yang berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tempat ibadah, tempat pengadilan, tempat pendidikan dan sebagainya.¹⁶

Santri adalah orang-orang yang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Para santri itu biasanya tinggal di pondok atau asrama, namun ada pula yang pergi pulang dari rumahnya. Pondok

¹⁴ MM. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, vii.

¹⁵ Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1983), 55.

¹⁶ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos, 2001), 56.

adalah asrama para santri yang merupakan ciri khas pesantren. Di tempat ini para santri bersama-sama belajar di bawah pimpinan seorang atau beberapa orang kyai /ustadz atau orang yang dianggap senior. Pendidikan di pondok pesantren lebih mengutamakan pembacaan dan pengenalan kitab-kitab klasik karangan-karangan ulama' terkenal. Adapun tujuan pengajaran ini adalah untuk memperdalam ajaran agama Islam dan juga untuk mendidik dan membekali calon-calon ulama' atau *da'i*.¹⁷ Kitab kuning ini biasanya berisi tentang fiqh, tafsir, shorof, ushul fiqh, hadits, tauhid, tashawuf, sastra Arab dan sebagainya.

D. Macam-macam Pondok Pesantren

Bentuk pondok pesantren yang ada di Indonesia sangat bervariasi. Secara kronologis, persentuhan pondok pesantren dengan madrasah mulai terjadi pada akhir abad XIX dan semakin nyata pada awal abad XX. Perkembangan model pendidikan Islam dari sistem pondok pesantren ke sistem madrasah ini terjadi karena pengaruh sistem *madrasi* yang sudah berkembang lebih dahulu di daerah Timur Tengah pada akhir abad XIX dan awal abad XX.¹⁸ Mereka alumni Timur Tengah kembali ke tanah air untuk pulang membawa pemikiran-pemikiran baru dalam sistem pendidikan Islam, yang pada intinya (1) mengembangkan sistem pengajaran dari pendekatan selama ini menjadi sistem klasikal, yang dikenal dengan sistem *madrasi*, (2) memberikan pengetahuan umum dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam dengan sistem *madrasi* ini dalam tahap berikutnya mengalami perkembangan, di satu pihak cenderung mengarah ke pendidikan umum dan pihak lain ada yang tetap mempertahankan dominasi pendidikan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Bentuk pertama dikenal dengan madrasah (*ibtida'iyah*, *tsanawiyah* dan *aliyah*), sedangkan bentuk kedua dikenal dengan madrasah diniyah atau salafiyah (*ula*, *wustha* dan *'ulya*).

Persentuhan sistem pondok pesantren ini membuat variasi

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 50.

¹⁸ *Ibid*, 80.

pondok pesantren semakin tinggi. Pada tahun 1977, di seluruh Indonesia tercatat 4.195 pondok dengan santri berjumlah 677.394 orang. Pada tahun 1985, pesantren berjumlah sekitar 6.239 dengan jumlah santri 1.084.801 orang. Data tahun 2001 menunjukkan jumlah pondok pesantren 12.783 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantren salafiyah tradisional sampai modern.

Hasil survei khusus untuk Jawa Timur tahun 1997, jumlah pesantren sekitar 2.772 dengan jumlah santri 626.081 orang, yang terdiri dari santri putra 347.938 orang dan santri putri 278.143 orang. Rata-rata setiap daerah memiliki sekitar 20 buah pesantren. Daerah yang cukup banyak adalah Malang sebanyak 295 dan Jember sebanyak 273 pesantren.¹⁹ Data tersebut bersifat sangat relatif, mengingat di tempat lain jumlahnya jauh lebih banyak dan sangat bervariasi. Sebagai contoh di Pesantren Miftahul Mubtadi'in di Krempyang Nganjuk, satu pesantren saja jumlah santrinya tahun 2005 ini mencapai 2.180 orang.

Dari segi bentuk, pondok pesantren secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, sebagaimana dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan pondok pesantren, yang mengategorikan pondok pesantren menjadi pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional (tipe A), pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal atau *madrasi* (tipe B), pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar (tipe C) dan pondok pesantren yang hanya mengajarkan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah (tipe D).

Selain bentuk di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bentuk atau model pesantren jauh lebih bervariasi. Sebagai contoh di sini bentuk-bentuk pesantren yang terdata sebagai berikut: (1) pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab

¹⁹ Qodri A. Azizy dan Amin Haedari, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 36.

klasik atau *salafiyah*, (2) pondok pesantren seperti yang telah diungkapkan pada tipe A, namun memberikan tambahan latihan keterampilan atau kegiatan pada para santri bidang-bidang kejuruan, (3) pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab, namun lebih mengarah pada upaya pengembangan *thariqat* atau sufisme dengan para santrinya kadang-kadang ada yang diasramakan dan ada pula yang tidak diasramakan, (4) pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan kegiatan keterampilan khusus agama Islam, kegiatan keagamaan, seperti hafalan al-Qur'an dan *majlis ta'lim*, kadang santri diasramakan, kadang juga tidak, (5) pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pada orang-orang yang menyandang masalah sosial, yaitu madrasah luar biasa di pondok pesantren, (6) pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab klasik juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal ke dalam lingkungan pondok pesantren, (7) pondok pesantren yang merupakan kombinasi dari beberapa poin atau seluruh poin yang tersedia di atas dan bersifat *konvergensi*.²⁰

Berdasarkan tingkat konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhannya oleh sistem modern, secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk. Pertama adalah *Pondok Pesantren Salafiyah*. Kata *salaf* artinya lama, dahulu atau tradisional. Pondok pesantren *salafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya, pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab, penjenjangan tidak didasarkan pada satu waktu -tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, santri dapat naik jenjang yang mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi, dan seterusnya.²¹

Kedua adalah *Pondok Pesantren Khalafiyah* atau *Ashriyah*. Kata *khalaf* artinya kemudian atau belakang, sedangkan kata

²⁰ *Ibid*, 9.

²¹ *Ibid*, 15.

ashriyah artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren *khalafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK) maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya. Pendekatan klasikal pembelajaran pondok pesantren *khalafiyah* dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan program-program yang didasarkan pada satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun kelas dan seterusnya. Pada pondok pesantren *khalafiyah*, kata pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.

Ketiga adalah *Pondok Pesantren Campuran* atau *Kombinasi*. Pondok pesantren *salafiyah* dan *khalafiyah* dengan penjelasan di atas adalah *safafiyah* dan *khalafiyah* dalam bentuk yang ekstrim. Namun fakta di lapangan tidak ada atau sedikit sekali pondok pesantren *salafiyah* atau *khalafiyah* dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Kondisi ini juga dijumpai pada pesantren *khalafiyah* yang umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem *ngaji kitab* selama ini diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Kondisi ini mengakibatkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren atau model kombinasi.²²

E. Tujuan Pondok Pesantren

Setiap lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren, tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai atau telah ditetapkan agar programnya terarah. Secara khusus, pondok pesantren bertujuan mempersiapkan para santri untuk menjadi

²² *Ibid*, 16.

orang *'alim* dalam ilmu agama yang diajarkan kyai dan mengamalkannya dalam masyarakat. Sedangkan secara umum, pondok pesantren bertujuan untuk membimbing santri menjadi manusia berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi *muballigh* Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.²³ Dalam kaitan dengan pembangunan sekarang ini, maka tujuan tersebut tidak lepas dari ciri-ciri tujuan bangsa yang telah ditetapkan dalam UU 1945, yaitu bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja professional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani maupun ruhani.²⁴

Dengan demikian jelas bahwa negara Indonesia menghendaki semua rakyat Indonesia menjadi manusia berpendidikan yang di dalamnya memiliki mental, moral dan budi pekerti luhur serta keyakinan agama yang kuat dan diimbangi dengan kecerdasan dan keterampilan tinggi dalam jasmani sehat. Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha pendidikan harus dapat menghasilkan manusia yang harmonis lahir dan batin. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan pondok pesantren harus dibina dan dikembangkan lebih intensif. Sebagai contoh para santri dibekali dengan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu keterampilan praktis lainnya dengan harapan para santri dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat dan dapat memajukan ke arah yang lebih baik.

Dengan sebuah ketrampilan, maka akan tercapai keseimbangan antara otak, hati dan tangan yang secara integral. Bagi para santri, keseluruhan itu juga berguna sebagai modal untuk menjadi manusia bersemangat wiraswasta, sehingga setelah tamat dari pesantren mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Jiwa

²³ Djamaluddin dan Abdulllah Aly, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, 106.

²⁴ Made Pidata, *Landasan Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 11.

wiraswasta sendiri akan cepat berkembang jika dilengkapi dengan penguasaan keterampilan tertentu.²⁵

Dengan adanya komponen pendidikan keterampilan, maka pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sebagian terletak dan berpengaruh di pedesaan diharapkan secara optimal memberikan bantuan moril bagi usaha-usaha pengembangan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka pondok pesantren sangat baik untuk dimanfaatkan dalam pengembangan masyarakat lingkungan pondok pesantren, sehingga pondok pesantren dapat diarahkan ke arah pembangunan melalui bahasa agama.²⁶

F. Sistem Pembelajaran di Pondok Pesantren

1. Kurikulum Pondok Pesantren

Madrasah atau sekolah yang diselenggarakan di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum di madrasah atau sekolah lain yang telah dibakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lembaga pendidikan formal lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, selain madrasah dan sekolah, kurikulumnya disusun oleh penyelenggara atau pondok pesantren yang bersangkutan. Berbeda dengan pesantren *khalafiyah*, pada pesantren *salafiyah* tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kurikulum pada pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren *salafiyah* disebut *manhaj*, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. *Manhaj* pada pondok pesantren *salafiyah* ini tidak dalam bentuk jabaran silabus, tetapi berupa *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.

Dalam pembelajaran yang diberikan kepada santri, pondok pesantren menggunakan *manhaj* dalam bentuk jenis-jenis kitab tertentu dalam cabang ilmu tertentu. Kitab ini harus dipelajari sampai tuntas, sebelum dapat naik jenjang ke kitab lain yang

²⁵ Tim Penyusun BKP3, *Pedoman Pendidikan Ketrampilan Pesantren Pembangunan* (Jakarta: Payu Barkah, 1976), 184-185.

²⁶ *Ibid*, 167.

lebih tinggi tingkat kesulitannya. Dengan demikian, masa tamat program pembelajaran tidak diukur dengan satuan waktu, juga tidak didasarkan pada penguasaan terhadap silabi topik-topik bahasan tertentu, tetapi didasarkan tamat atau tuntasnya santri mempelajari kitab yang telah ditetapkan. Kompetensi standar bagi tamatan pondok pesantren adalah kemampuan menguasai dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah ditetapkan.

Kompetensi standar tersebut tercermin pada penguasaan kitab-kitab secara graduatif atau berurutan dari yang ringan sampai yang berat, dari yang mudah ke kitab yang lebih sulit, dari kitab tipis ke kitab yang bejilid-jilid. Kitab-kitab yang digunakan tersebut biasanya kitab-kitab kuning atau *kutub al-salaf*. Disebut demikian karena umumnya kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning. Di kalangan pondok pesantren sendiri, di samping istilah kitab kuning, beredar juga istilah *kitab klasik* untuk menyebut kitab yang sama. Kitab-kitab tersebut pada umumnya tidak diberi *harakat*, sehingga disebut juga *kitab gundul*. Ada juga yang disebut *kitab kuno*, karena rentang waktu sejarah yang sangat jauh sejak disusun dan diterbitkan sampai sekarang.

Dalam tradisi intelektual Islam, penyebutan istilah kitab karya ilmiah para ulama' itu dibedakan berdasarkan kurun waktu atau format penuliasannya. Pengajaran kitab-kitab ini, meskipun berjenjang materi yang diajarkan kadang berulang-ulang. Penjenjangan dimaksudkan untuk pendalaman dan perluasan, sehingga penguasaan santri terhadap isi atau materi semakin mantap. Hal ini menjadi salah satu ciri penyelenggaraan pembelajaran di pondok pesantren. Dalam pelaksanaan penjenjangan tidak mutlak, dapat saja pondok pesantren memberikan tambahan atau melakukan langkah-langkah inovasi, misalnya dengan mengajarkan kitab-kitab yang lebih populer, tetapi lebih dalam penyajiannya, sehingga lebih efektif para santri dalam menguasai materi.

2. Metode Belajar

Metode pembelajaran di pondok pesantren *salafiyah* ada yang bersifat tradisional, yaitu pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan yang telah lama dilaksanakan di pesantren atau dapat juga disebut sebagai metode pembelajaran asli (*original*) di pondok pesantren. Di samping itu ada pula metode pembelajaran modern (*tajdid*). Metode pembelajaran *tajdid* merupakan metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern, meski tidak selalu diikuti penerapan sistem modern, yaitu sistem sekolah atau madrasah.

Di antara metode pembelajaran tradisional yang menjadi ciri umum pembelajaran pondok pesantren *salafiyah* adalah metode *sorogan*. Kata *sorogan* berasal dari kata *sorog* dari bahasa Jawa yang berarti menyodorkan. Disebut demikian karena setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kyai atau pembantunya yang disebut badal. Metode *sorogan* ini termasuk belajar individual, karena seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi langsung saling mengenal di antara keduanya.

Kedua adalah metode *bandongan*. Metode ini dilaksanakan saat kyai membacakan kitab kuning tertentu, sedangkan santri memberikan makna di kitabnya tentang materi yang sedang dibacakan kyai. Metode ini, di samping metode *sorogan*, merupakan metode pembelajaran orisinil di dunia pondok pesantren. Ketiga adalah metode *wetonan*. Istilah *weton* berasal dalam bahasa Jawa yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melakukan *shalat fardhu* atau pada hari-hari tertentu. Metode *wetonan* ini merupakan metode kuliah, karena para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran ala kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya.

Keempat adalah metode *musyawarah* atau *bahtsul masa'il*. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang dipimpin langsung seorang kyai atau ustadz senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, metode ini juga dikenal dengan istilah *bahtsul masa'il*. Dalam pelaksanaan, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya.

Kelima adalah metode *pengajian pasaran*. Metode ini adalah kegiatan para santri melalui pengajian materi (kitab) tertentu pada kyai atau ustadz yang dilakukan oleh santri dalam kegiatan yang dilakukan terus-menerus (maraton) selama tenggang waktu tertentu. Pada umumnya dilakukan pada bulan Ramadhan selama setengah bulan atau dua puluh hari, bahkan terkadang satu bulan penuh, tergantung jumlah halaman kitab yang dikaji. Metode ini lebih mirip metode *bandongan*, yang target utamanya adalah selesainya kitab yang dipelajari.

Keenam adalah metode *hafalan*. Dalam metode ini, para santri diberi tugas menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki oleh santri ini kemudian dihafalkan di hadapan kyai atau ustadz secara periodik atau insidental, tergantung pada petunjuk kyai yang bersangkutan. Materi pembelajaran dengan metode hafalan umumnya berkenaan dengan al-Qur'an, *nadzam-nadzam* untuk *nahwu*, *sharaf*, *tajwid* ataupun untuk teks-teks.

Ketujuh adalah metode demonstrasi atau praktik ibadah. Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan individu maupun kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan kyai atau ustadz, dengan urutan kegiatan; (1) para santri mendapatkan penjelasan atau teori tentang tata cara pelaksanaan ibadah yang akan dipraktikkan sampai paham, (2) para santri berdasarkan bimbingan kyai atau ustadz mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang

diperlukan untuk kegiatan praktik, (3) setelah menentukan waktu dan tempat para santri berkumpul untuk menerima penjelasan singkat berkenaan dengan urutan kegiatan yang akan dilakukan serta pembagian tugas kepada para santri berkenaan dengan pelaksanaan praktik, (4) para santri secara bergiliran memperagakan pelaksanaan praktik ibadah tertentu dengan dibimbing dan diarahkan oleh kyai atau ustadz sampai benar-benar sesuai dengan tata cara pelaksanaan ibadah sesungguhnya, (5) setelah selesai kegiatan praktik ibadah para santri diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang dipandang perlu selama berlangsung kegiatan.

3. Masa Pembelajaran dan Syahadah

Pada saat santri selesai atau dianggap cukup di dalam menerima pendidikan, dimana rata-rata waktu pembelajaran di pondok pesantren tergantung pada pimpinan yang bersangkutan, ada yang tiga tahun atau enam tahun, baik berupa pengajian dan pendidikan keterampilan, biasanya akan menerima ijazah, sebagaimana halnya yang terjadi pada sekolah umum, madrasah atau lembaga pendidikan lainnya. Ijazah atau *syahadah* merupakan lembaran yang menunjukkan atau tanda bukti telah selesainya pendidikan seseorang di suatu perguruan untuk masa pembelajaran tertentu. Di dunia pondok pesantren, pengertian ijazah memiliki nama-nama tertentu. Tidak seragam dengan kata ijazah, ada yang menyebutnya dengan istilah *syahadah* dan lainnya.²⁷

G. Kebijakan Pendidikan

Sebelum membahas kebijakan pendidikan, perlu diketahui tentang analisis kebijakan. Menurut Duncan MacRae, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai dan membuahakan pemikiran

²⁷ Qodri A. Azizy dan Amin Haedari, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*, 20.

dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.²⁸ Sementara itu, menurut Penelaahan Sektor Pendidikan tahun 1986, analisis kebijakan adalah suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Informasi teknis itu merupakan suatu satuan pernyataan kebenaran induktif yang didukung oleh kebenaran secara empiris sebagai hasil dari rangkaian analisis data.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Sehingga, dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang termasuk pada ruang lingkup lingkungan kebijakan pendidikan adalah yang berada pada lingkungan dari sistem pendidikan tersebut, baik terpusat maupun daerah. Lingkungan kebijakan pendidikan terpusat meliputi seluruh komponen yang berada dalam negara tersebut, sedangkan lingkungan kebijakan pendidikan daerah meliputi daerah-daerah tertentu.

Terdapat empat tingkat kebijakan yang menunjuk pada level kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan.²⁹ Pertama adalah tingkatan kebijakan nasional atau *national policy level*. Penentu tingkat kebijakan nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kebijakan yang berada pada level nasional ini disebut juga kebijakan administratif. Kedua adalah tingkatan kebijakan umum atau *general policy level*. Disebut juga dengan kebijakan eksekutif, oleh karena yang menentukan adalah pihak-pihak yang berada pada posisi eksekutif. Yang termasuk ke dalam

²⁸ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 1994), 40.

²⁹<http://jinaui.wordpress.com/2011/05/05/konsep-dasar-kebijaksanaan-pendidikan/>

kebijakan eksekutif ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan atau instruksi presiden.

Ketiga adalah tingkatan kebijakan khusus atau *special policy level*. Letak penentu kebijakan ini ada pada tangan menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif, maka tingkat kebijakan khusus ini disebut juga kebijakan eksekutif. Tingkat kebijakan khusus ini dibuat oleh menteri dengan berdasarkan kebijakan yang berada di atasnya. Keempat adalah tingkat kebijakan teknis atau *technical policy level*. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan operatif karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijakan ini berada pada pejabat eselon II ke bawah, seperti direktur jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen. Produk kebijakan ini dapat berupa peraturan, keputusan dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan *technical policy level* ini, gubernur, kakanwil, bupati dan kakandep di masing-masing bidang melaksanakan kebijakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasi daerahnya. Dengan bahasa lain, faktor kondisi dan situasi daerah yang kadang-kadang membedakan corak penerapan kebijakan yang berasal dari instansi atasnya. Yang dimaksud dengan faktor kondisional dan situasional dapat berupa budaya, ekonomi, politik, hankam, sosial dan sumber daya yang dapat dikerahkan di daerah tersebut.

Terdapat dua agenda kebijakan, yaitu agenda sistemik dan agenda pemerintah. Agenda sistemik bersifat luas, karena terdiri dari semua masalah di pemerintah. Yang termasuk sub agenda dalam agenda sistemik yaitu (1) agenda profesional, yang terdiri dari isu-isu lalu didiskusikan di dalam berbagai kepentingan kelompok, jaringan pendidikan kebijakan dan asosiasi pendidikan, (2) agenda media, yang terdiri dari isu-isu pendidikan yang berhubungan dengan industri komunikasi, (3) agenda publik, yang mencakup masalah-masalah pendidikan di masyarakat umum. Agenda publik biasanya lebih pendek dibandingkan dengan dua lainnya, dan sangat dipengaruhi oleh agenda media. Sedangkan agenda pemerintah terdiri dari daftar mata pelajaran atau masalah untuk pemerintah.

Pembahasan tentang metodologi dalam analisis kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai substansi pendidikan itu sendiri. Prosedur kerja atau metodologis analisis kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar.³⁰ Pertama, fungsi alokasi yang menekankan fungsi analisis kebijakan dalam penentuan agenda analisis kebijakan (*agenda setting mechanism*). Kedua, fungsi inquiri yang menekankan pada fungsi analisis kebijakan dalam dimensi rasional untuk menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai bahan masukan bagi proses pembuatan keputusan pendidikan. Ketiga, fungsi komunikasi yang menekankan cara-cara atau prosedur efisien untuk memasarkan hasil-hasil kebijakan sehingga memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan.³¹ Ketiga fungsi tersebut merupakan suatu perangkat lengkap, sehingga analisis kebijakan tidak akan dapat mencapai sasaran jika salah satu fungsi atau lebih tidak dilakukan.

Fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi penting yang perlu dimainkan oleh kegiatan analisis kebijakan. Hal ini terkait dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan dan analisis kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kajian terhadap isu-isu kebijakan pendidikan dalam tingkatan yang lebih makro dan strategis.

Kajian makro tidak akan terlepas dari sistem-sistem lain yang menyangkut sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankamnas. Kajian makro merupakan analisis hubungan timbal balik antara sistem pendidikan dengan sistem yang lebih besar. Agar pendidikan memiliki kesesuaian dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu keadaan agar sistem pendidikan dapat berkembang secara seimbang dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar sistem lingkungannya. Dari perkembangan-perkembangan tersebut, kajian interdisipliner perlu dilakukan dengan jalan memetakan isu-isu

³⁰<http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>

³¹ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 55.

kebijakan pendidikan berdasarkan tuntutan dari berbagai bidang kehidupan di luar sistem pendidikan.

Langkah selanjutnya adalah dialog kebijakan (*policy dialog*) mengenai isu-isu yang benar-benar telah teruji secara rasional empiris tersebut antara analisis kebijakan dengan pihak pembuat kebijakan. Dialog tersebut dimaksudkan agar diperoleh maksud mengenai urutan prioritas itu sendiri berdasarkan pandangan para pembuat keputusan. Maksudnya adalah untuk mempertemukan antara hasil penelitian dengan pandangan para pembuat keputusan mengenai isu kebijakan yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi. Dalam menentukan agenda penelitian yang tepat guna dan tepat waktu, analisis kebijakan harus mampu memilih berbagai isu kebijakan pendidikan dalam beberapa tingkatan. Dalam melakukan isu kebijakan dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu kebijakan strategis (*strategis decision*) dan kebijakan taktis operasional (*operasional tactical*).

Dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, isu-isu pendidikan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu (1) isu strategis-politis, bersifat sangat mendasar sehingga memiliki pengaruh makro dan jangka panjang, bersifat nasional dan lebih dirasakan oleh pimpinan dan para politisi, seperti RUU tentang sistem pendidikan, (2) isu teknis dan masih bersifat makro, tetapi lebih berkaitan dengan bentuk-bentuk penerapannya dalam perencanaan dan pengelolaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan secara sektoral, (3) isu operasional, berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para perencana dan pengelola program pendidikan sehari-hari dalam implementasi suatu kebijakan tertentu.³²

Fungsi inquiri dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan serta sudah mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiri, setiap topik penelitian yang ada merupakan komponen-komponen integral dari suatu isu kebijakan strategis-politis, sehingga hasil-hasil penelitian

³² *Ibid*, 59.

dan pengembangan juga akan tersusun secara terorganisasi sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang sedang disoroti. Dalam melaksanakan fungsi inquiri, kegiatan analisis kebijakan melaksanakan kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Kajian tersebut bisa berbentuk kajian metodologi dan bisa berbentuk kajian substansi.³³ Kajian metodologi ini dimaksudkan untuk memberi umpan balik bagi para peneliti agar dicapai penyempurnaan metodologi di kemudian hari.

Kajian substansi dimaksudkan untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kajian substansi dimaksudkan untuk menguji realisasi suatu gagasan. Untuk memperoleh usulan kebijakan yang diuji kemungkinan penerapannya berdasarkan analisis ekonomi, politik, sosiologis dan administratif, sehingga setiap gagasan pembaharuan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif yang ada.

Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Tugas analisis kebijakan dalam hal ini adalah menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan-gagasan yang diusulkan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pembuat keputusan, para perencana, para pengelola, para peneliti dan pemikir, para pelaksana serta masyarakat luas.

Para pembuat keputusan adalah para pimpinan atau eksekutif dalam suatu organisasi.³⁴ Hal ini bertujuan untuk menyampaikan usul alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan sekaligus meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan tersebut cukup realistis. Di samping itu, juga perlu dilakukan

³³ *Ibid*, 60.

³⁴ Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik* (Jakarta: Gramedia, 2004), 44.

komunikasi dengan para perencana, komunikasi dengan para pelaksana kebijakan agar pihak-pihak yang melaksanakan setiap satuan kegiatan di lapangan dan komunikasi dengan masyarakat luas, dengan dasar pemikiran bahwa para pemimpin bangsa sekaligus para pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat luas.

Dalam ilmu politik, siklus kebijakan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis perkembangan item kebijakan. Hal ini juga dapat disebut sebagai pendekatan stagist.³⁵ Salah satu versi standar meliputi agenda pengaturan atau identifikasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan bahasa yang agak berbeda, sebuah siklus delapan langkah kebijakan dikembangkan secara rinci oleh Peter Bridgman dan Davis Glyn, yaitu identifikasi masalah, analisis kebijakan, kebijakan pengembangan instrumen, konsultasi, koordinasi, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah atau pandangan hidup bangsa. Tujuan dan bentuk upaya kehidupan bangsa akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh suatu bangsa.

Secara umum, jenis pondok pesantren bisa dikategorikan kedalam bentuk *salafiyah* dan *khalafiyah*. Meskipun demikian, realitas di lapangan tidak menunjukkan bentuk yang ekstrim. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian diatas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Begitu juga pesantren *khalafiyah* pada

³⁵<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Policy>.

umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem *ngaji kitab* diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Hal ini menyebabkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan pesantren.

Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari semua isu yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan pendidikan. Sistem dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan meliputi fungsi alokasi, fungsi inquiri dan fungsi komunikasi. Pondok pesantren –meskipun merupakan model pendidikan asli pribumi– namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Hanun, 2001, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos).
- Azizy, Qodri A. dan Amin Haedari, 2004, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Departemen Agama RI).
- Bawani, Imam, 2007, *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur).
- Dhofier, Zamakhsyari, 1983, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES).
- Djamaludin dan Abdullah Aly, 1998, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia).
- Hasan, MM. Ali dan Mukti Ali, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).
- <http://www.abdimadrasah.com/2015/01/struktur-kurikulum-2013-kombinasi-kurikulum-2006-pada-madrasah.html>.
- <http://gladysnereweb.blogspot.com/2013/05/kelebihan-dan-kekuranga-kurikulum-2013.html>.
- <http://jinaui.wordpress.com/2011/05/05/konsep-dasar-kebijaksanaan-pendidikan/>
- <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>
- <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Policy>.
- Karcher, Manfred Oepon Walfgang, 1988, *Dinamika Pesantren* (Jakarta: P3M).
- Pidata, Made, 1997, *Landasan Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Salusu, 2004, *Pengambilan Keputusan Stratejik* (Jakarta: Gramedia).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 1997, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya).
- Tim Penyusun BKP3, 1976, *Pedoman Pendidikan Ketrampilan Pesantren Pembangunan* (Jakarta: Payu Barkah).

Ahmad Saifuddin